

[Date]

Laporan kinerjaku 2024

Tahunan

BALAI BESAR KIPM JAKARTA I

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Lkj Balai Besar KIPM) Jakarta I Tahunan Tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggung jawaban Balai Besar KIPM Jakarta I dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan target kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, kendala dan tantangan yang dihadapi serta upaya yang telah dilakukan, kinerja anggaran, dan prestasi serta penghargaan serta kinerja lainnya yang telah diraih selama Tahun 2024.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Balai Besar KIPM Jakarta I. Secara umum, pada Tahun 2024 sebagian besar target indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan telah berhasil dicapai.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Balai Besar KIPM Jakarta I di masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Tangerang, 20 Januari 2025

Plt Kepala Balai Besar KIPM Jakarta I



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1 CAPAIAN KINERJA	8
2.2 ANALISIS DAN EVALUASI	10
2.3 REALISASI ANGGARAN.....	56
2.4 EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN.....	57
BAB III PENUTUP	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar KIPM Jakarta I Tahun 2024.....	5
Tabel 2. Capaian Kinerja Balai Besar KIPM Jakarta I Tahun 2024.....	9
Tabel 3. Target dan Realisasi IKK 1 pada Tahun 2024.....	12
Tabel 4. Target dan Realisasi IKK 2 pada Tahun 2024.....	13
Tabel 5. Target dan Realisasi IKK 3 pada Tahun 2024.....	15
Tabel 6. Target dan Realisasi IKK 4 pada Tahun 2024.....	16
Tabel 7. Target dan Realisasi IKK 5 pada Tahun 2024.....	18
Tabel 8. Target dan Realisasi IKK 6 pada Tahun 2024.....	19
Tabel 9. Target dan Realisasi IKK 7 pada Tahun 2024.....	20
Tabel 10. Target dan Realisasi IKK 8 pada Tahun 2024.....	22
Tabel 11. Target dan Realisasi IKK 9 pada Tahun 2024.....	24
Tabel 12. Target dan Realisasi IKK 10 pada Tahun 2024.....	26
Tabel 13. Target dan Realisasi IKK 11 pada Tahun 2024.....	27
Tabel 14. Target dan Realisasi IKK 12 pada Tahun 2024.....	28
Tabel 15. Target dan Realisasi IKK 13 pada Tahun 2024.....	29
Tabel 16. Target dan Realisasi IKK 14 pada Tahun 2024.....	30
Tabel 17. Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.....	34
Tabel 18. Target dan Realisasi IKK 15 pada Tahun 2024.....	34
Tabel 19. Target dan Realisasi IKK 16 Tahun 2024.....	35
Tabel 20. Persyaratan Penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja WBK/WBBM.....	37
Tabel 21. Target dan Realisasi IKK 17 pada Tahun 2024.....	37
Tabel 22. Target dan Realisasi IKK 18 pada Tahun 2024.....	40
Tabel 23. Target dan Realisasi IKK 19 pada Tahun 2024.....	41
Tabel 24. Target dan Realisasi IKK 20 pada Tahun 2024.....	42
Tabel 25. Target dan Realisasi IKK 21 pada Tahun 2024.....	44
Tabel 26. Target dan Realisasi IKK 22 pada Tahun 2024.....	51
Tabel 27. Target dan Realisasi IKK 23 pada Tahun 2024.....	52
Tabel 28. Target dan Realisasi IKK 24 pada Tahun 2024.....	54
Tabel 29. Target dan Realisasi IKK 25 pada Tahun 2024.....	55
Tabel 30. Penyerapan Anggaran per Kegiatan Tahun 2024.....	56
Tabel 31. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja 2024.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar KIPM Jakarta I.....	2
Gambar 2. Keragaan SDM Balai Besar KIPM Jakarta I.....	4
Gambar 3. Dashboard NPSS Balai Besar KIPM Jakarta I Tahun 2024	8
Gambar 4. Kegiatan Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar & Menerapkan Biosecurity Tahun 2024.....	24
Gambar 5. Alur Sertifikasi Penerapan HACCP di UPI.....	29
Gambar 6. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024.....	33
Gambar 7. Dashboard Sidak Rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal KKP Balai Besar KIPM Jakarta I TahunanTahun 2024	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Balai Besar KIPM Jakarta I Tahun 2024	61
Lampiran 2. Kasus Pelanggaran Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang terselesaikan	65
Lampiran 3. Realisasi Sertifikasi CKIB Tahun 2024	66
Lampiran 4. Rekapitulasi Jumlah UPI dan sertifikasi HACCP	67

		Data Dukung1							
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I							
	IKSK.03.08	Data Dukung1	80	80	100	120	80	100	120
		Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I							
	IKSK.03.09	Data Dukung1	80	80	84,34	105,43	80	84,34	105,43
		Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I							
	IKSK.03.10	Data Dukung1	80	80	97,5	120	80	97,5	120

Realisasi Keuangan Balai Besar KIPM Jakarta I pada tahun 2024 sebesar 8.086.353.888 (Delapan miliar delapan puluh enam juta tiga ratus limapuluh tiga delapan ratus delapan puluh rupiah) atau 94,47% dari pagu anggaran awal Balai Besar KIPM Jakarta I sebesar Rp.9.144.126.00 (Sembilan Milyar serratus empat puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu .

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA												
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA I												
REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA												
NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	427520 BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA I	PAGU	4,053,015,000	4,126,217,000	964,894,000	0	0	0	0	0	0	9,144,126,000
		REALISASI	4,038,324,212 (98.64%)	3,307,447,876 (80.16%)	740,582,800 (76.75%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8,086,354,888 (88.43%)
		SISA	14,690,788	818,769,124	224,311,200	0	0	0	0	0	0	1,057,771,112
GRAND TOTAL		PAGU	4,053,015,000	4,126,217,000	964,894,000	0	0	0	0	0	0	9,144,126,000
		REALISASI	4,038,324,212 (99.64%)	3,307,447,876 (80.16%)	740,582,800 (76.75%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	8,086,354,888 (88.43%)
		SISA	14,690,788	818,769,124	224,311,200	0	0	0	0	0	0	1,057,771,112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Besar KIPM Jakarta I merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas pokok dan fungsi BPPMHKP berkaitan penyelenggaraan , Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, serta Keamanan Hayatikan. menjamin mutu hasil perikanan.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Besar KIPM Jakarta I dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama satu triwulan pada Tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Disamping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap bidang di lingkungan Balai Besar KIPM Jakarta I serta sarana untuk mendapatkan masukan dari *stakeholder* demi perbaikan kinerja Balai Besar KIPM Jakarta I. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar KIPM Jakarta



1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMENKP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat perubahan struktur organisasi unit kerja eselon III dan IV di Balai Besar KIPM Jakarta I menjadi Jabatan Fungsional sehingga struktur organisasi Balai Besar KIPM Jakarta I berubah seperti pada Gambar 1.

Pada melaksanakan tugas Balai Besar KIPM Jakarta I sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 tahun 2024 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang dalam pelaksanaannya membentuk Tim Kerja pada bidang masing-masing. Pada Balai Besar KIPM Jakarta I Tim kerja menjadi 4 bagian sesuai dengan surat tugas kepala Balai Besar KIPM Jakarta I nomor B: 4272/BBK.JKT.I/KP.440/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 1) Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 2) Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan 3) Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, dan Keamanan Hasil Perikanan 4) Dukungan Manajerial.

Tim Kerja Pengendalian kesehatan Ikan, Mutu dan keamanan Hasil Perikanan indikator Kinerjanya

- UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM
- Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan lingkup UPT Pelayanan Operasional (sertifikat)
- Persentase penyakit ikan karantina yang di cegah penyebarannya antar zona lingkup UPT pelayanan Operasional KIPM (%)
- Unit Penanganan dan/atau pengelolaan ikan yang menerapkan antar zona lingkup UPT pelayanan Operasional KIPM (UPI)
- Sertifikatsi Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (Produk)
- Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (Dokumen)
- Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM (Dokumen)

- Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasi yang diidentifikasi lingkup UPT Operasional KIPM
- Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan ikan, mutu dan Keamanan hasil Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity lingkup UPY Pelayanan Operasional

Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

- Efektivitas Sertifikat Ekspor ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina lingkup UPT pelayanan Operasional
- Pengawasan mutu hasil perikanan domestic lingkup UPT Pelayanan Operasional KIPM
- Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT pelayanan Operasional KIPM
- Persentase Tindakan Karantina Impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup UPT Pelayanan Operasional

Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, dan Keamanan Hasil Perikanan

- Nilai survey Kepuasan masyarakat layanan public di UPT Pelayanan Operasional
- Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Operasional KIPM
- Lokasi Usaha Perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar system dan regulasi lingkup UPT pelayanan Operasional KIPM (Lokasi)

Tim Kerja Dukungan Manajerial.

- Unit kerja berpredikat WBK lingkup UPT pelayanan Operasional KIPM
- Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT pelayanan Operasional KIPM
- Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup UPT pelayanan Operasional KIPM
- Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup UPT pelayanan Operasional KIPM
- Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang di manfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPY pelayanan Operasional
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT pelayanan Operasional KIPM
- Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa lingkup UPT pelayanan Operasional KIPM
- Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BPPMHKP lingkup UPT pelayanan Operasional KIPM

Sesuai dengan surat kerja Plt Balai Besar KIPM Jakarta I nomor B.184/BBKIPM.JKT.I/KP.440/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 perihal Tim kerja pada Balai Besar KIPM Jakarta I maka perubahan pada uraian Tim Kerja indikator yang berubah tetap menjadi 3 SK antara lain sebagai berikut :

1. SK1. Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil kelautan Perikanan
 - ✚ Persentantase hasil kelautan dan perikanan sector Prduksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I dengan target 70
 - ✚ Persentase hasil kelautan dan perikanan sector produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I target 70
 - ✚ Persentase pengawasan mutu hasil perikana di wilayah RI lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I target 70
 - ✚ Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh tujuan ekspor lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I target 99
2. SK2. Terselenggaranya Pengendalian system jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar
 - ✚ Nilai pemenuhan penerapan system manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I target 70
3. SK3. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I
 - ✚ Inovasi Pelayanan Publik yang di terapkan pada unit kerja lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I target 1
 - ✚ Indexs kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai Besar KIPM Jakarta I target 3,36
 - ✚ Index Profesionalitas ASN lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I target 86
 - ✚ Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I target 82
 - ✚ Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I target 71
 - ✚ Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I target 93,76
 - ✚ Penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I target 100
 - ✚ Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang di dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I target 80
 - ✚ Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I target 80
 - ✚ Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I Target 80

Balai Besar KIPM Jakarta I mempunyai fungsi antara lain : a) penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan; b) pelaksanaan sertifikasi kesehatan Ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (*biosecurity*); c) pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan Instalasi; d) pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu; n) penerapan Sistem Manajemen Mutu pelayanan operasional dan laboratorium; p) pengumpulan, pengolahan data dan informasi ,pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati Ikan; dan q) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Jumlah SDM aparatur yang mendukung Balai Besar KIPM Jakarta I sejumlah 40 pegawai yang terdiri dari 21 Pegawai berstatus PNS yaitu 1 pegawai pejabat struktural, 1 Inspektur Mutu Hasil Perikanan Madya, 4 Inspektur Mutu Hasil Perikanan Muda, 2 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda, 1 Pranata Komputer Muda, 1 Arsiparis Muda, 1 Inspektur Mutu Hasil Perikanan Pertama, 3 Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir, 2 Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil, 1 Pranata Komputer Pertama, 1 Pranata Komputer Lanjutan, 1 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama, 1 Pranata Keuangan APBN Penyelia, 1 Pranata Keuangan APBN Terampil, 7 Fungsional Umum, 19 orang PPNPN, 4 Tenaga Outsourcing, 2 Tenaga Outsourcing Driver dan Editing. Distribusi pegawai yang berimbang ini diperlukan dalam membentuk workforce yang efektif dan efisien. Selain itu, Balai Besar KIPM Jakarta I juga mempertimbangkan komposisi dari segi jabatan, golongan, pendidikan dan kompetensi. Komposisi yang berimbang merupakan dukungan dalam pencapaian sasaran kinerja Balai Besar KIPM Jakarta I dalam perspektif *learning and growth*.



Gambar 2. Keragaan SDM Balai Besar KIPM Jakarta I Tahun 2025

1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan IKK sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk

diwujudkan pada tahun berjalan. Setiap IKK disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam RENSTRA. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki IKK yang terukur. Balai Besar KIPM Jakarta I telah menyusun RENSTRA Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar KIPM Jakarta I Nomor [656/01.0/TU.110/VII/2020](#) tanggal 27 Juli 2020.

Peta Strategi adalah suatu dashboard yang memetakan RENSTRA Organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Dari Peta Strategi tersebut, dijabarkan IKK dan target kinerja yang akan dicapai Balai Besar KIPM Jakarta I pada Tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam PK Balai Besar KIPM Jakarta I. Penyusunan PK ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.



Gambar 2. PETA STARATEGIS

PK ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala BPPMHKP adan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 62/KEP- BPPMHKP/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja di Lingkungan BPPMHKP. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Balai Besar KIPM Jakarta I Tahun 2024 diuraikan seperti pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai Besar KIPM Jakarta I Tahun 2024



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 14
 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
 LAMAN www.bkkp.go.id EMAIL web@bkkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA I

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Suharyanto**
 Jabatan : Pjt. Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
 Jabatan : Pjt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Januari 2024

Pihak Kedua

Pjt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



Ishartini

Pihak Pertama

Pjt. Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I



Suharyanto

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	13 Nilai Kinerja Anggaran BKIPM lingkup UPT BKKIPM Jakarta I (Nilai)	86
	14 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM lingkup UPT BKKIPM Jakarta I (%)	80
	15 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup UPT BKKIPM Jakarta I (%)	80

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu			
BK1.1	1 Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional Dan Partisipatif	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT BKKIPM Jakarta I (Sertifikat)	2
	2	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup UPT BKKIPM Jakarta I (Lokasi)	4
	3	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT BKKIPM Jakarta I (UPI)	45
	4	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT BKKIPM Jakarta I (Produk)	246
	5	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT BKKIPM Jakarta I (UPI)	60
Kegiatan 2. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan			
BK2.1	6 Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Sistem Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional Dan Partisipatif	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT BKKIPM Jakarta I (Nilai)	84
	7	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT BKKIPM Jakarta I (Lokasi)	2
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP			
BK3.1	8 Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPPMHKP	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT BKKIPM Jakarta I (Indeks)	86
	9	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT BKKIPM Jakarta I (Nilai)	82
	10	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT BKKIPM Jakarta I (%)	100
	11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT BKKIPM Jakarta I (%)	80
	12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT BKKIPM Jakarta I (Nilai)	93,75

Jakarta, 16 Januari 2024

Pihak Kedua

Pjt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



Ishartini

Pihak Pertama

Pjt. Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I



Suharyanto

Dengan adanya **Pembaharuan Tata kerja organisasi -KKP nomor 2 Tahun 2025** tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian kelautan dan Perikanan maka susunan organisasi di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikan juga mengalami perubahan khusus di lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Hasi Perikanan (BPPHP) dan lingkup Pusat pusat .dan untuk tercapaian program program pusat maka perjanjian kinerja juga mengalami perubahan selain program anggaran juga mengalami perubahan

Gambar Revisi PK bulan Oktober 2024



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 KEP-10041
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
 LAMAN: HYPERLINK "http://www.kkp.go.id" www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN JAKARTA I

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Suharyanto**
 Jabatan : Pjt. Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I

Selanjutnya disebut pihak pertama;

Nama : **Ishartini**
 Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua: Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Ishartini)
 Pihak Pertama: Pjt. Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I (Suharyanto)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN JAKARTA I

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
SK.1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	70
	2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	70
	3 Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	70
	4 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	99
SK.2 Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5 Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	70
SK.3 Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I	6 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I (Inovasi)	1
	7 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai Besar KIPM Jakarta I (Indeks)	3,36
	8 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I (Indeks)	88
	9 Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I (Nilai)	82
	10 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I (Nilai)	71
	11 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I (Nilai)	93,76
	12 Penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	100
	13 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	80
	14 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	80
	15 Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I (%)	80

Data Anggaran

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.531.894.000,-
2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	171.294.000,-
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2024	7.094.007.000,-
Total Anggaran Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I		8.797.195.000,-

Jakarta, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua: Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Ishartini)
 Pihak Pertama: Pjt. Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I (Suharyanto)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Visi Balai Besar KIPM Jakarta I ditetapkan dengan Visi KKP 2020-2024 dan BKIPM yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BKIPM menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020-2024, yaitu:

1. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

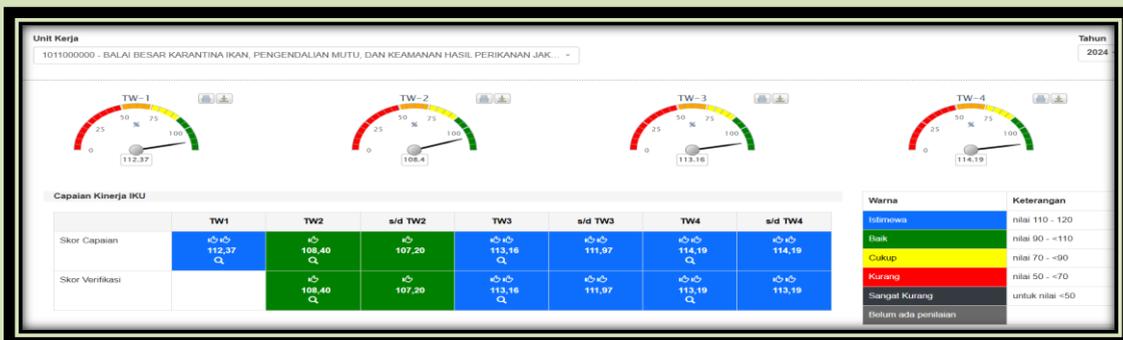
Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BKIPM bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (dua) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif, serta
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

2.2 CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja Balai Besar KIPM Jakarta I merupakan kinerja secara kolektif dari 3 (tiga) bidang di lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala setiap triwulan, dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) berbasis web dengan alamat www.kinerjaku.kkp.go.id.

Untuk mengukur keberhasilan visi dan misi dalam menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagaimana dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, telah ditetapkan total ukur berserta target kinerja per tahun yang diperjanjikan dalam Perjanjian secara berjenjang dan dilakukan pengukuran secara berkala sebagai bagian dari proses pengendalian pelaksanaan pembangunan. Potret kinerja Balai Besar KIPM Jakarta I pada Tahunan 2024 sangat Baik, hal ini tercermin dari capaian 3 sasaran strategis dengan 15 indikator kinerja kegiatan (IKK) yang memiliki nilai Pencapaian Sasaran Strategis sebesar 114,19%. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.



Gambar 3. Dashboard NPSS Balai Besar KIPM Jakarta I Tahunan 2024

NPSS pada Tahunan 2024 ini capaiannya keseluruhan sebesar 114,19% mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan NPSS Tahunan 2023 yang besarnya 106,69%



Gambar 3. Dashboard NPSS Balai Besar KIPM Jakarta I Tahunan 2023

2.1 ANALISIS DAN EVALUASI

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan :

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif (Pengendalian Mutu) di peroleh dari capaian IKK yang tertuangng dalam Perjanjian Kinerja (PK) dengan rincian IKK sebagai berikut :

1. Persentase Kelautan dan Perikanan sector produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I dengan target 70
2. Persentase hasil Kelautan dan Perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan hasil Perikanan Balai Besar KIPM Jakarta I dengan target 70
3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang di terima negara tujuan ekspor lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I

IKK 1. PERSENTASE HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKTOR PRODUKSI PRIMER YANG MEMENUHI STANDAR MUTU DAN KEAMANAN HASIL PANGAN LINGKUP BALAI BESAR KIPM JAKARTA I

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Rumus

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Precentage Unit Usaha menerapkan CPOIB

F = Persentnase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

Xn= Jumlah dan unsur Pembentuk

Pada periode Januari – Desember 2024 Indikator Kinerja ini terealisasi 100% melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 70%. Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan ada 2 (dua) yaitu CPOIB di PT. NUGEN BIOSCIENCE INDONESIA dengan 4 (empat) jenis sediaan (Biologik, Premiks, Obat Alami, Probiotik) dan CDOIB di PT. NOVINDO AGRITECH HUTAMA dengan 4 (empat) jenis sediaan (Premiks cair, Premiks serbuk, Obat Alami, Probiotik) . Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I (%X) ;

$$\%X = \frac{100\%+100\%}{2} \times 100 \%$$

$$\%X = 100$$

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan											
PERSENTASE HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKTOR PRODUKSI PRIMER YANG MEMENUHI STANDAR MUTU DAN KEAMANAN HASIL PANGAN LINGKUP BALAI BESAR KIPM JAKARTA I											
Realisasi Tahun 2023		Realisasi Tahun 2024							Renstra BPPMHKP 2020-2024		
TW IV	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW IV	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2024	Target PK 2024	%Realisasi thd Target PK	Target 2024	Target 2024	%Capaian thd Target Restra
0	0	0	70	100	120	0	70	100	70	70	100%

Tabel 12. Target dan Realisasi IKK 10 pada Tahun 2024

1. Capaian IKU

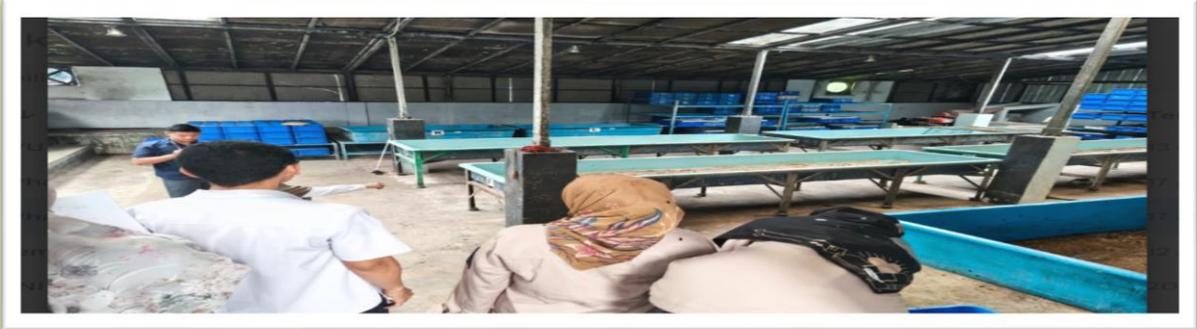
Jumlah suplier yang telah mendapat ijin sertifikat CPOIB yang diterbitkan pada tahun 2024 berjumlah 7 perusahaan telah di laksanakan sesuai dengan instruksi dari pusat guna mendukung kegiatan CPOIB , Sedangkan target IK sesuai dengan revisi PK (Perjanjian Kinerja) adalah 70 % dan teralisasi semua capaian menjadi 100%

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Kegiatan pendukung IK Jumlah sertifikat CPOIB suplier yang diterbitkan yaitu :

- a. Inspeksi ke Supplier untuk penerbitan Sertifikat CPOIB
- b. Verifikasi ke Supplier untuk verifikasi Sertifikat yang sudah diterbitkan

Faktor keberhasilan dalam mencapai realisasi IKK ini adalah melakukan sosialisasi khususnya kepada Unit Pengolah Ikan dan supplier, karena dengan tersertifikasinya supplier akan menjamin mutu . Faktor penghambat dalam pencapaian target IKK ini antara lain : dengan kegiatan yang baru maka factor penyusaian dalam bentuk pemahaman masih terbatas untuk menyampaikan kegiatan kepada supplier sehingga diperlukan sosialisasi kepada supplier baik teori maupun praktek di wilayah Kerja Balai Besar KIPM Jakarta I, factor anggaran masih manjadi factor penentu dalam melaksanakan kegiatan ini maka dengan anggaran yang tersedia maka kegiatan tersebut trus di laksanakan





IKK2. PERSENTASE HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKTOR PRODUKSI PASCA PANEN YANG MEMENUHI STANDAR MUTU DAN KEAMANAN PANGAN LINGKUP BALAI BESAR KIPM JAKARTA I

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

DI sampaikan dengan rumus sesuai dengan manual IKU

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

Indikator Presentase Hasil kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

$$\%X = \frac{169,1+74,19\%}{2} \times 100$$

$$= 121,65\%$$

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan											
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi Standar Mutu dan keamanan pangan lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I											
Realisasi Tahun 2023		Realisasi Tahun 2024							Renstra BPPMHKP 2020-2024		
TW IV	2023	Realisasi TW Sebelumnya (TW I 2023)	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2023	Target PK 2023	%Realisasi thd Target PK	Target 2024	Target 2024	%Capaian thd Target Restra
0	0	0	70	121,65	120	0	0	70	70	70	120

Target dan Realisasi IKK 2 pada TahunanTahun 2024

1. Capaian IKU

Periode **Januari – Desember 2024** komponen indikator ini yaitu sertifikat HACCP ruang lingkup produk terealisasi sebanyak **416** sertifikat (**169,1%**) dari target sebanyak **246** sertifikat sedangkan komponen Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) terealisasi sebanyak **115** sertifikat (**74,19%**) dari **155** rekomendasi yang diajukan. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup BBKIPM Jakarta I (%X) Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup BBKIPM

Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Pemeliharaan system jaminan dan pengawasan serta monitoring upi yang di lakukan secara berkala dan berkoordinasi langsung kepada pihak UPI,keberhasil yang di lakukan tersebut juga di dukung oleh pegawai dan anggaran yang memadai sehingga target yang dicapai dalam kegiatan tersebut bisa tercapai



IKK.3.PERSENTANASE PENGAWASAN MUTU HASIL PERIKANAN DI WILAYAH RI LINGKUP BALAI BESAR KIPM JAKARTA I

Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi,pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan Persentase pengawasan mutu hasil erikanan di wilayah RI merupakan nilai Pengawasan Mutu hasil KP di wilayah RI yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran *marine biotoxin* dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP.Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini dilakukan di Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar moderen, Pasar

Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji Organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan Lokasi wilayah Perairan/Pelabuhan Perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestic yang bebas dari cemaran *marine biotoxin* dan cemaran kimia berbahaya.

$$\%X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

%X = Persentase pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI

A = Jumlah kab/kota /yang dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI

B = Jumlah kab/kota/yang ditetapkan untuk dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah

$$\%x = \frac{4}{4} \times 100 \%$$

$$\%x = 100 \%$$

4 (A) = jumlah kab/kota yang melakukan pengawasan mutu hasil Perikanan

4 (B) = jumlah Kab/kota yang di tetapkan untuk dilakukan pengawasan mutu

100 (%X) = Persentase Pengawasan dan hasil perikanan di wilyah RI

Terselenggarannya pengendalian dan pengwasan mutu hasil kelautan dan perikanan											
Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I											
Realisasi Tahun 2023		Realisasi Tahun 2024							Renstra BPPMHKP 2020-2024		
TW IV	2023	Realisasi TW Sebelumnya (TW IV 2024)	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2023	Target PK 2024	%Realisasi thd Target PK	Target 2023	Target 2024	%Capaian thd Target Restra
0	0	0	70	100	120	0	70	100	0	70	100

1. Capaian IKU

Pada periode Januari – Desember 2024 Indikator Kinerja ini terealisasi 100% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 4 lokasi. Lokasi yang menjadi objek pengendalian penjaminan mutu hasil perikanan domestik di wilayah kerja Balai Besar KIPM Jakarta I yaitu Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor dan Kab. Bogor. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I (%X) ;

Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Lokasi yang menjadi objek pengendalian penjaminan mutu hasil perikanan domestik di wilayah kerja Balai Besar KIPM Jakarta I yaitu Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor dan Kab. Bogor dengan koordinasi dengan pemerintah daerah masing masing sehingga 4 lokasi tersebut dapat terpenuhi dan di laksanakan

IKK .4. RASIO ESKPOR IKAN HASIL PERIKANAN YANG DI TERIMA OLEH NEGARA TUJUAN ESKPOR LINGKUP BALAI BESAR KIPM JAKARTA I

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Kemanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

$$x = \frac{A - B}{A}$$

x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)
 A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP
 B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

Terselenggaranya pengendalian dan pengwasan mutu hasil kelautan dan perikanan

RASIO ESKPOR IKAN HASIL PERIKANAN YANG DI TERIMA OLEH NEGARA TUJUAN ESKPOR LINGKUP BALAI BESAR KIPM JAKARTA I

Realisasi Tahun 2023		Realisasi Tahun 2024							Renstra BPPMHKP 2020-2024		
TW I	2023	Realisasi TW Sebelumnya (TW I 2023)	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2023	Target PK 2024	%Realisasi thd Target PK	Target 2023	Target 2024	%Capaian thd Target Restra
0	0	0	99	99,98	100,99	0	99	100	0	99	100

1. Capaian IKU

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC terbit) dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor). Perhitungan rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup BBKIPM Jakarta I (%) pada periode Januari – Desember 2024 sebagai berikut ;

$$\% X = \frac{17757-4}{17757} \times 100\%$$

$$\% X = 99,98 \%$$

Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Dengan ada perubahan kebijakan dari pusat untuk pelayanan terhadap mutu maka Balai Besar KIPM Jakarta I tetap melayani HC mutu yang hampir seluruhnya tujuan ke luar negeri volume pengeluaran HC dalam sehari bisa berjumlah 30 lembar perhari artinya dalam hitungan 24 jam jadi 60 lembar perhari penerbitkan HC juga di lakukan dengan kegiatan kunjungan ke UPI – UPI yang menjadi target dalam pengiriman ke luar negeri

REKAPITULASI DATA HC EKSPOR BBKIPM JAKARTA I
TAHUN 2024

NO	NO PPK	TANGGAL PPK	TANGGAL SERTIFIKAT	NO SERTIFIKAT	NAMA PRODUK	JUMLAH	SATUAN	NEGARA TUJUAN
1	E/E/01.0/20240101/000034	2024-01-01 10:52:16.000	2024-01-01 15:10:09.000	P8/KI-D1/01.0/2024/000056	FRESH GROUPER FISH	29	kg	Singapore
2	E/E/01.0/20240102/000151	2024-01-02 14:20:46.000	2024-01-02 16:19:47.000	P8/KI-D1/01.0/2024/000137	FRESH KING FISH	158	kg	Taiwan
3	E/E/01.0/20240102/000186	2024-01-02 19:46:37.000	2024-01-02 22:21:51.000	P8/KI-D1/01.0/2024/000183	DRIED FISH MAWS	200	kg	Hong Kong
4	E/E/01.0/20240103/000224	2024-01-03 09:57:24.000	2024-01-04 16:28:38.000	01.0-00030-2024	FROZEN RAW SHRIMP	15876	kg	United States
5	E/E/01.0/20240103/000279	2024-01-03 14:31:57.000	2024-01-03 17:25:32.000	01.0-00012-2024	DRIED SEA WORM	130	kg	Vietnam
6	E/E/01.0/20240106/000751	2024-01-06 09:30:51.000	2024-01-07 09:35:32.000	01.0-00084-2024	FROZEN SPANISH MACKEREL FISH	17500	kg	China
7	E/E/01.0/20240106/000770	2024-01-06 11:45:32.000	2024-01-06 15:14:04.000	P8/KI-D1/01.0/2024/000607	FRESH KING FISH	45.5	kg	Taiwan
8	E/E/01.0/20240106/000793	2024-01-06 13:28:15.000	2024-01-06 14:26:18.000	P8/KI-D1/01.0/2024/000588	FRESH WHITE POMFRET	125.2	kg	Taiwan
9	E/E/01.0/20240106/000794	2024-01-06 13:29:16.000	2024-01-06 14:32:56.000	P8/KI-D1/01.0/2024/000591	FRESH WHITE POMFRET	25	kg	Taiwan
10	E/E/01.0/20240106/000806	2024-01-06 14:26:26.000	2024-01-06 15:08:30.000	P8/KI-D1/01.0/2024/000598	FRESH BELT FISH	361.9	kg	Singapore
11	E/E/01.0/20240107/000910	2024-01-07 11:00:03.000	2024-01-07 13:24:34.000	P8/KI-D1/01.0/2024/000716	FRESH POMFRET	496.7	kg	Taiwan
12	E/E/01.0/20240107/000915	2024-01-07 11:03:40.000	2024-01-07 13:05:15.000	P8/KI-D1/01.0/2024/000713	FRESH GROUPER	71	kg	Taiwan
13	E/E/01.0/20240108/001050	2024-01-08 12:00:53.000	2024-01-08 19:01:49.000	P8/KI-D1/01.0/2024/000853	FRESH KING FISH	62	kg	Taiwan
14	E/E/01.0/20240108/001083	2024-01-08 14:55:37.000	2024-01-08 18:46:33.000	P8/KI-D1/01.0/2024/000845	FRESH BELT FISH	17.5	kg	Taiwan
15	E/E/01.0/20240108/001083	2024-01-08 14:55:37.000	2024-01-08 18:46:33.000	P8/KI-D1/01.0/2024/000845	FRESH THREADFIN	73.8	kg	Taiwan
16	E/E/01.0/20240109/001246	2024-01-09 15:40:19.000	2024-01-09 15:43:30.000	P8/KI-D1/01.0/2024/000958	FRESH GROUPER FISH	180	kg	Saudi Arabia
17	E/E/01.0/20240109/001261	2024-01-09 17:27:19.000	2024-01-09 17:46:17.000	P8/KI-D1/01.0/2024/000978	FRESH WHITE SHRIMP	355.7	kg	Singapore
18	E/E/01.0/20240109/001342	2024-01-09 17:59:32.000	2024-01-10 06:11:39.000	P8/KI-D1/01.0/2024/001062	DRIED FISH MAW	77	kg	Hong Kong
19	E/E/01.0/20240110/001381	2024-01-10 09:30:41.000	2024-01-12 14:43:14.000	P8/KI-D1/01.0/2024/001251	FROZEN HIMEJI SURIMI	100000	kg	Thailand
20	E/E/01.0/20240110/001386	2024-01-10 10:42:38.000	2024-01-11 17:40:56.000	P8/KI-D1/01.0/2024/001278	FROZEN CRABMEAT	81.72	kg	Singapore
21	E/E/01.0/20240110/001466	2024-01-10 15:03:35.000	2024-01-11 17:41:27.000	01.0-00145-2024	OCTOPUS	8812.14	kg	United States
22	E/E/01.0/20240111/001656	2024-01-11 14:09:54.000	2024-01-11 21:36:11.000	01.0-00152-2024	DRIED PIPE FISH	48	kg	Vietnam
23	E/E/01.0/20240113/001954	2024-01-13 09:37:33.000	2024-01-13 14:26:14.000	P8/KI-D1/01.0/2024/001552	FRESH BELT FISH	351.2	kg	Taiwan
24	E/E/01.0/20240115/002209	2024-01-15 11:19:40.000	2024-01-15 11:30:43.000	P8/KI-D1/01.0/2024/001741	FROZEN CATFISH EGG	600	kg	Thailand
25	E/E/01.0/20240119/003924	2024-01-19 15:12:21.000	2024-01-19 15:58:12.000	P8/KI-D1/01.0/2024/002334	FRESH THREADFIN	51.8	kg	Taiwan
26	E/E/01.0/20240121/003157	2024-01-21 10:33:00.000	2024-01-22 15:36:34.000	01.0-00291-2024	FROZEN SPANISH MACKEREL	27708.7	kg	China
27	E/E/01.0/20240122/003294	2024-01-22 12:32:48.000	2024-01-22 12:41:42.000	P8/KI-D1/01.0/2024/002651	FRESH WHITE SHRIMP	32	kg	Taiwan
28	E/E/01.0/20240122/003325	2024-01-22 14:29:24.000	2024-01-22 14:57:47.000	P8/KI-D1/01.0/2024/002672	FRESH THREADFIN	60	kg	Taiwan
29	E/E/01.0/20240123/003423	2024-01-23 08:33:46.000	2024-01-24 16:54:46.000	01.0-00315-2024	FROZEN SQUID	27532.4	kg	China
30	E/E/01.0/20240124/003690	2024-01-24 13:44:11.000	2024-01-24 15:23:01.000	01.0-00311-2024	DRIED FISH MAW	47	kg	Vietnam
31	E/E/01.0/20240129/004553	2024-01-29 20:47:31.000	2024-01-29 20:55:55.000	01.0-00404-2024	FROZEN RIBBON FISH GRADE B	9381	kg	China
32	E/E/01.0/20240125/003842	2024-01-25 10:35:51.000	2024-01-25 17:49:52.000	P8/KI-D1/01.0/2024/003164	FRESH POMFRET	730.8	kg	Singapore
33	E/E/01.0/20240125/003885	2024-01-25 13:38:37.000	2024-01-25 15:17:44.000	P8/KI-D1/01.0/2024/003140	FRESH BELT FISH	60	kg	Singapore
34	E/E/01.0/20240126/004076	2024-01-26 17:18:03.000	2024-01-26 17:20:33.000	P8/KI-D1/01.0/2024/003282	FRESH WHITE POMFRET	102.4	kg	Taiwan
35	E/E/01.0/20240127/004165	2024-01-27 12:33:11.000	2024-01-27 12:50:39.000	P8/KI-D1/01.0/2024/003384	DRIED ANCHOVY	2	kg	Singapore
36	E/E/01.0/20240129/004498	2024-01-29 17:42:23.000	2024-01-29 19:38:27.000	P8/KI-D1/01.0/2024/003685	FRESH GROUPER FISH	119.2	kg	Taiwan
37	E/E/01.0/20240129/004553	2024-01-29 20:47:31.000	2024-01-29 20:55:55.000	01.0-00404-2024	FROZEN RIBBON FISH GRADE B	9381	kg	China
38	E/E/01.0/20240130/004464	2024-01-30 12:09:05.000	2024-01-30 17:33:28.000	01.0-00415-2024	FRESH BELT FISH	125	kg	China
39	E/E/01.0/20240130/004720	2024-01-30 14:33:42.000	2024-01-30 15:28:44.000	P8/KI-D1/01.0/2024/003835	FRESH GROUPER	17.53	kg	Singapore
40	E/E/01.0/20240201/005050	2024-02-01 05:54:43.000	2024-02-01 09:08:23.000	01.0-00440-2024	FRESH POMFRET	118	kg	China
41	E/E/01.0/20240202/005384	2024-02-02 23:57:58.000	2024-02-03 04:22:04.000	P8/KI-D1/01.0/2024/004406	FROZEN CATFISH EGG	850	kg	Thailand
42	E/E/01.0/20240203/005426	2024-02-03 02:25:51.000	2024-02-03 04:01:00.000	P8/KI-D1/01.0/2024/004404	FRESH POMFRET	155	kg	Hong Kong
43	E/E/01.0/20240205/005780	2024-02-05 11:30:36.000	2024-02-05 15:21:12.000	P8/KI-D1/01.0/2024/004745	FRESH KING FISH	59.7	kg	Taiwan

TERSELENGGARANNYA PENGENDALIAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG KONSISTEN SESUAI STANDAR

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis terselenggaranya Pengendalian di peroleh dari capaian IKK yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) dengan rincian IKK sebagai berikut :

IKK. NILAI PEMENUHAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU LABORATORIUM PENGUJI DAN LEMBAGA INSPEKSI LINGKUP BALAI BESAR KIPM JAKARTA I

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki. ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium pengujian yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian (ISO 17025) di laboratorium *official control* yang dinilai melingkupi :

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses

Persyaratan Sistem Manajemen ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses

NILAI PEMENUHAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU LABORATORIUM PENGUJI DAN LEMBAGA INSPEKSI LINGKUP BALAI BESAR KIPM JAKARTA I											
Realisasi Tahun 2023		Realisasi Tahun 2023							Renstra BPPMHKP 2020-2024		
TW IV	2023	Realisasi TW Sebelumnya (TW IV/2024)	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2023	Target PK 2024	%Realisasi thd Target PK	Target 2023	Target 2024	%Capaian thd Target Restra
0	0	0	70	70	83,10	0	1	100	0	1	100

1. Capaian IKU

Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium sebesar 81,35 didapatkan dari 13 laboratorium (daftar seperti pada Lampiran 1). Berdasarkan perbandingan nilai realisasi dengan nilai target yaitu 70, maka nilai realisasi sebesar 116,21%;

Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi sebesar 84,85 didapatkan dari 14 lembaga inspeksi (daftar seperti pada Lampiran 2). Berdasarkan perbandingan nilai realisasi dengan nilai target yaitu 70, maka nilai realisasi sebesar 121,21%;

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Sasaran Program 4.

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup BPPMHKP (Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP)

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan dan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif meningkat diperoleh dari pencapaian IKK Nilai Survei Kepuasan Masyarakat layanan publik di UPT Balai Besar KIPM Jakarta I, Lokasi usaha perikanan yang menerapkan *Quality Assurance* sesuai standar sistem dan regulasi di lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I. Capaian atas target kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut :

IKK 15. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai Besar KIPM Jakarta I

Survei Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri PAN RB Nomor 14/KEP/M.PAN RB/2017 yang kemudian dikembangkan menjadi 9 unsur yang "relevan", "valid" dan "reliabel", sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat yaitu :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;

3. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;

4. Biaya/Tarif

Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan;

8. Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;

Survei Kepuasan Masyarakat pada Balai Besar KIPM Jakarta I dilaksanakan selama 4 periode triwulan pada Tahun 2024, dengan metode perhitungan nilai Survei Kepuasan Masyarakat yaitu dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan memakai rumus sebagai berikut :

$$1 \quad \text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9}$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang(0,071) dengan rumus sebagai berikut :

$$2 \quad \text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang diisi}}$$

Adapun perhitungan IKK ini merujuk pada posisi akhir, sehingga diperoleh nilai SKM Tahunan Tahun 2024 adalah 87,88 dengan total Responden 58 Nilai Persepsi, Nilai Interval SKM, Nilai Interval Konversi SKM, dan Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan, dihitung dengan berpedoman pada Keputusan Menpan Nomor KEP/14/M.PAN RB/2017 tentang Pedoman SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana Tabel 17 di bawah ini :



Data IKM

Triwulan 4 2024 Submit

50 Data terakhir Tw 4/2024, untuk selengkapnya silahkan download data dalam bentuk excel

Download Data

10 entries per page

Kd Es1	Nama UPP	Tahun	Tw	Rating	Nilai IKM	Jml Responden
bkipm	Balai Besar KIPM Jakarta I	2024	4	4.92	90.65	74

Dengan nilai SKM Unit Pelayanan (Nilai Interval Konversi SKM), diperoleh nilai posisi akhir pada Tahun 2024 yaitu . Berpedoman pada tabel tersebut di atas, maka dapat dikatakan Mutu pelayanan yang dilaksanakan bernilai “A” atau kinerja Unit Pelayanan dan Mutu Pelayanan Balai Besar KIPM Jakarta I adalah “

Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai Besar KIPM Jakarta I

Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai Besar KIPM Jakarta I

Realisasi Tahun 2023		Realisasi Tahun 2024							Renstra BPPMHKP 2020-2024		
TW IV	2023	Realisasi TW Sebelumnya (TW IV/2024)	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2023	Target PK 2024	%Realisasi thd Target PK	Target 2023	Target 2024	%Capaian thd Target Restra
0	0	0	3,36	3,36	4,92	0	3,36	4,92	0	3,36	100

Target dan Realisasi IKK 15 pada Tahun 2024

1 .Capaian IKU

IK Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Jakarta I periode pengukuran dan pelaporan capaian triwulana dan merupakan IK baru yang sebelumnya tidak ada di tahun 2023. Target IK Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Jakarta I pada Renstra BPPMHKP Jakarta I dan Renstra BPPMHKP adalah 84. Realisasi IK yaitu 100% pada Tahunan Tahun 2024 telah mencapai target IK Tahunanyaitu 84 dan target IK Tahun 2024 terhadap prosentase target dengan realisasi Tahunan.

2 Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Faktor keberhasilan dalam mencapai realisasi IKK ini antara lain : semakin meningkatnya kompetensi SDM pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, adanya inovasi pelayanan **Mpoksiti** yang semakin mempermudah pengguna layanan dalam mendapatkan layanan secara eletronik terutama pada masa transisi pandemi ke endemi serta komitmen bersama segenap unsur pimpinan danjajarannya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Faktor penghambat dalam pencapaian target IKK ini antara lain : kurangnya respek dari responden/kurang bersungguh-sungguh dalam memberikan pendapatnya (tidak obyektif) dan kurangnya pemahaman responden akan pentingnya hasil SKM.

Sasaran Program 4.

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup BPPMHKP (Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP)

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis terselenggaranya tata kelola pemerintah yang baik lingkup BPPMHKP meningkat diperoleh dari pencapaian IKK Unit berpredikat menuju WBK lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I, Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I, Nilai rekonsiliasi kinerja satker lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I, Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I, Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I, Nilai Indikator Kerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I, Nilai kinerja

Anggaran BPPMHKP lingkup Balai Besar Jakarta I, Nilai kepatuhan pengadaan barang/jasa BPPMHKP lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I, Nilai kepatuhan BMN lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I. Capaian atas target kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut :

IKK 18. Indeks profesionalitas ASN lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap Tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi KKP dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk menghitung Indeks Profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut :

Nilai diukur setiap Tahun dengan menggunakan 4 (Empat) dimensi, meliputi :

- a. Dimensi Kualifikasi (25%) - mengukur kualifikasi pendidikan formal dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah;
- b. Dimensi Kompetensi (40%) - mengukur riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan;
- c. Dimensi Kinerja (30%) - mengukur penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan
- d. perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS;
- e. Dimensi Disiplin (5%) - mengukur data / informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS.

2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :
 - a. Pendidikan S-3 (Strata Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata Satu)/ D-4 (Diploma Empat)
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
 - e. Pendidikan D-2 (Diploma Dua) / D-1 (Diploma Satu)/ SLTA/ Sederajat
 - f. Pendidikan di bawah SLTA dengan formula sebagai berikut :

Nilai	Nama Kualifikasi	Nilai Kualifikasi
5	S-3	25
4	S-2	20
3	S-1 / D-IV	15
2	D-III	10
1	D-II / D-I / SLTA	5
0	SMP / SD	1

3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi : Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/ Diklat Teknis dan Seminar/Workshop/ Magang/Kursus/ sejenisnya.
4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi :
 - a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan
 - b. Perilaku Kerja Pegawai (PKP);
5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi :
 - a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan Laporan Kinerja _– Tahun 2024
 - b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi :

- a. Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah *update* pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
- b. Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perhitungan nilai Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, dan Seminar/Workshop/Magang/Kursus/ sejenisnya diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;
- Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat Kepemimpinan sesuai dengan level
- jabatan terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu Tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;

IKK ini dihitung dari jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator. Untuk Tahunan Tahun 2024 IKK Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I dalam capaian 86.16 dari target 84 bersumber dari diklat, seminar dan workshop penilaian tersebut adalah nilai dari setiap pegawai yang melaksanakan kompetensi kepegawaian .untuk mencapai target nilai 84

5	BALAI BESAR KIPM JAKARTA I	66	21.06	84.24 %	35.16	87.9 %	25	83.33 %	4.94	98.8 %	86.16	TINGGI
---	----------------------------	----	-------	---------	-------	--------	----	---------	------	--------	-------	--------

Tabel 22. Target dan Realisasi IKK 18 pada Tahun 2024

Faktor keberhasilan dalam mencapai realisasi IKK ini antara lain :

- ✚ Pemutakhiran data kualifikasi pendidikan pegawai yang telah memperoleh pencantuman gelar pada aplikasi e-pegawai;
- ✚ Rekam data pengembangan kompetensi pegawai berupa Pelatihan/ Seminar/ Workshop/ Magang/ Kursus/ sejenisnya dan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan baik secara *online* maupun secara *offline*;
- ✚ Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja Pegawai secara keseluruhan bernilai baik sehingga penilaian kinerja organisasi bernilai baik;
- ✚ Konsistensi pegawai dalam meningkatkan profesionalitasnya;

Faktor penghambat dalam pencapaian target IKK ini antara lain : Pegawai kurang mencari informasi pelatihan yang sesuai, dan adapun pelatihan tidak mempunyai sertifikat

Kegiatan-4 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup BPPMHKP											
Indeks profesionalitas ASN lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I											
Realisasi Tahun 2023		Realisasi Tahun 2024							Renstra BPPMHKP 2020-2024		
TW IV	2023	Realisasi TW Sebelumnya (TW IV 2024)	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2023	Target PK 2024	%Realisasi thd Target PK	Target 2023	Target 2024	%Capaian thd Target Restra
84	94,11	86,67	84	86,15%	102,57%	0	84	102,57%	83	86	100%

1. Capaian IKU

IK Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP Jakarta I periode pengukuran dan pelaporan capaian semesteran. Pada tahun 2024 mencapai target tahunan, yaitu 102,57% dari target tahunan yaitu 100% dengan realisasi 86,15. Target IK Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP Jakarta I pada Renstra BPPMHKP Jakarta I dan Renstra BPPMHKP adalah 84. Sedangkan pada tahun 2023 target IKU 83 telah meningkat dari target tahun 2024 yaitu 84. Pada Tahun 2024 realisasi IK yaitu 86,15 sehingga target Tahun 2024, Target PK Tahun 2024, target Renstra BPPMHKP dan BPPMHKP Jakarta I tercapai dengan prosentase 100%

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Denngan ada ya pelatihan dari pusat dan elearning untuk menaikkan IP ASN akan lebih cepat serta di dukung dengan sertifikat sebagai bukti pendukung melaksanakan kegiatan tersebut

Factor kegagalan factor utama informasi pelatihan yang kurang ,bentuk pelatihannya yang tidak sesuai dengan status pegawai contoh untuk elearning perbendaharaan banyak di dalam kegiatan yang tidak menunjang dengan tusi akhir pegawai tidak mengutinya

IKK 19. Nilai Mandiri Sakip Satker lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I

Nilai rekonsiliasi kinerja dilakukan dengan mengeksaminasi 3 aspek, yaitu Kepatuhan, Kesesuaian dan Ketercapaian. Agar pembahas rekonsiliasi dapat melakukan eksaminasi maka unit kerja harus memiliki :

- Perjanjian Kinerja
- Manual IKU
- Rincian Target IKU
- Rencana Aksi
- Laporan Kinerja Intern
- Laporan Kinerja
- Dokumen Data Dukung LKj

Rekonsiliasi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen tersebut, serta membandingkan hasil yang ada di dalam dokumen dengan hasil yang telah diinput ke dalam aplikasi kinerjajaku.

Kegiatan-4 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup BPPMHKP											
Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I											
Realisasi Tahun 2023		Realisasi Tahun 2024							Renstra BPPMHKP 2020-2024		
TW IV	2023	Realisasi TW Sebelumnya (TW IV2024)	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2023	Target PK 2024	%Realisasi thd Target PK	Target 2023	Target 2024	%Capaian thd Target Restra
85	85	85	82	82	100	100	81	81	85	82	100

1. Capaian IKU

IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker BPPMHKP Jakarta I periode pengukuran dan pelaporan capaian tahunan. Pada tahun 2024, IKU telah mencapai target tahunan, yaitu 103,35% dari target tahunan yaitu 100% dengan realisasi 87,85. Target Nilai Rekonsiliasi Kinerja UPT BPPMHKP Jakarta I pada Renstra BPPMHKP Jakarta I dan Renstra BPPMHKP adalah 85. Sedangkan pada tahun 2024 . Pada Tahun 2023 realisasi IK 87,85, sehingga target TahunanTahun 2024, Target PK 2023, Target Renstra BPPMHKP dan BPPMHKP Jakarta I memenuhi target dengan capaian prosentase 103,35%.

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Kegiatan pendukung yaitu Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran, Penyusunan RKT, dan Penyusunan Laporan Kinerja, serta pengiriman dokumen tepat waktu.

Faktor pendukung keberhasilan tercapainya target IKK ini antara lain : melakukan pengelolaan kinerja dari sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi; melakukan pelaporan tepat waktu; dan melakukan reuiu terhadap target maupun capaian yang tercapai atau tidak, Implementasi dari rencana aksi terhadap target-target yang tidak tercapai.

Faktor penghambat dalam pencapaian target IKK ini antara lain: adanya perubahan terhadapRenja dan adanya kegiatan yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah ditetapkan.

IKK 20. Presentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Kategori opini terhadap laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang diberikan oleh BPK yaitu :

Skala	Opini
5	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
4	WTP DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf)
3	WDP (Wajar dengan Pengecualian)
2	Tidak Wajar
1	TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

Formula penghitungan IKK ini adalah sebagai berikut :

Batas tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK Balai Besar KIPM Jakarta I dibandingkan Realisasi Anggaran Balai Besar KIPM Jakarta I TA 2024 =

$$\frac{\text{Jumlah Nilai Temuan atas Laporan Keuangan TA 2024 yang disajikan pada LHP atas kepatuhan}}{\text{Realisasi riil tahun 2024}} \times 100\%$$

Keterangan :

Batas tertinggi jumlah temuan atas laporan keuangan TA. 2024 tidak melebihi 1 %

Untuk Tahun 2024 IKK Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I belum ada data yang di sampaikan di karenakan pelaksanaan audit BPK di laksanakan 2 kali dalam setahun .

Kegiatan-4 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup BPPMHKP											
Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BPPMHKP											
Realisasi Tahun 2023		Realisasi Tahun 2024							Renstra BPPMHKP 2020-2024		
TW IV	2023	Realisasi TW Sebelumnya (TW III 2024)	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2023	Target PK 2024	%Realisasi thd Target PK	Target 2023	Target 2024	%Capaian thd Target Restra
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 23. Target dan Realisasi IKK pada Tahunan Tahun 2024

1. Capaian IKU

IKU Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Jakarta I periode pengukuran dan pelaporan capaian tahunan. Pada tahun 2023, belum ditetapkan target. Target IK Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Jakarta I pada Renstra BPPMHKP Jakarta I dan Renstra BPPMHKP adalah ≤ 1 . Pada tahun 2024 diharapkan dapat konsisten dari target tahun 2024 yaitu 100%. Pada Tahun 2024 realisasi IKU Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BPPMHKP Lingkup Balai KIPM Jakarta I yaitu 0, sehingga target Tahunan Tahun 2024, Target PK 2024, Target Renstra BPPMHKP dan BPPMHKP Jakarta I memenuhi target dengan capaian prosentase 100%.

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Kegiatan pendukung IK ini adalah pertanggung jawaban kegiatan yang sudah sesuai dengan peraturan keuangan dan di sampaikan dalam laporan keuangan untuk di laporkan pada setiap semester antara lain :

1. Penyelesaian seluruh rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Balai Besar KIPM Jakarta I Tahun 2024 dilengkapi dengan bukti-bukti pendukungnya;
2. Penertiban penatausahaan persediaan, penyajian persediaan dalam neraca yang telah dilengkapi dengan inventarisasi serta pencatatan persediaan dalam aplikasi; dan
3. Meningkatkan peran aktif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan *probity audit* dan reviu atas pengadaan barang dan jasa mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.

Faktor penghambat dalam pencapaian target IKK ini adalah, kurang paham pengelola anggaran dan BMN dalam pertanggung jawaban dan penataan dalam pengelolaan anggaran dan BMN

IKK. 21 Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I

Presentnase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang ditindaklanjuti (proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan.

Untuk unit kerja yang dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP dan terdapat temuan/rekomendasi pada unit kerja tersebut, maka capaiannya dihitung seperti manual IKU yang ada yaitu jumlah tindak lanjut rekomendasi pada periode pengukuran dibagi dengan jumlah

temuan/rekomendasi yang diberikan pada LHP sesuai periode pengukuran. Untuk unit kerja yang tidak dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP sama sekali, maka capaiannya diberi nilai maksimal dari target pada setiap periode pengukuran. Untuk unit kerja level II yang tidak dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP sama sekali, maka capaiannya diberi nilai maksimal dari target pada setiap periode pengukuran dan untuk kumulatif setahun maka diberi nilai maksimal target setiap triwulan.

Formula penghitungan IKK ini sebagai berikut :

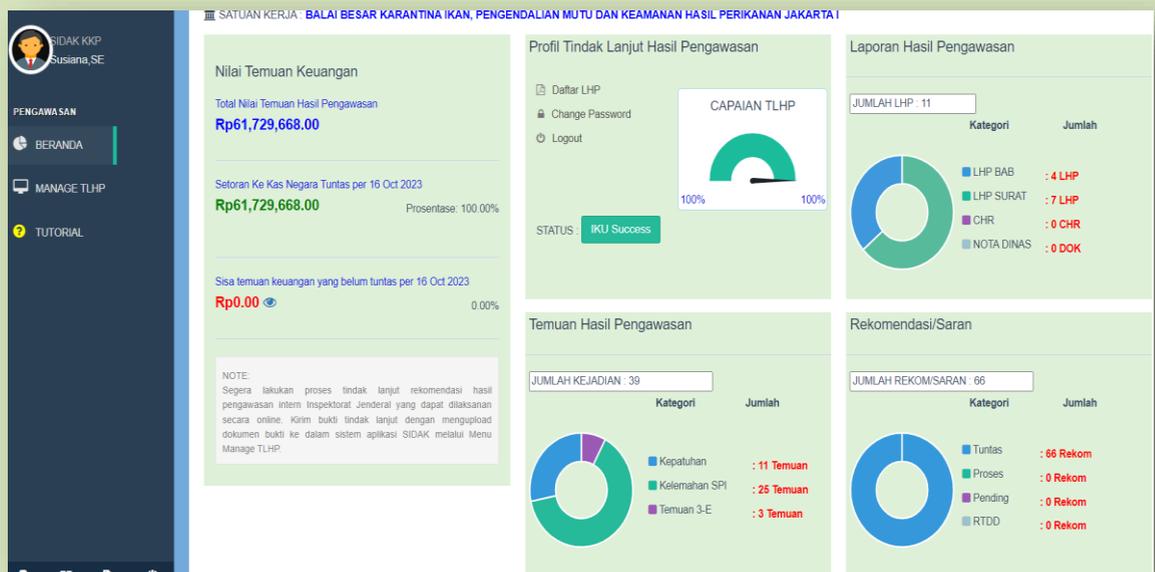
$$\frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$$

$\sum Nt$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindak lanjuti oleh Balai Besar KIPM Jakarta I

$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Balai Besar KIPM Jakarta I

Jumlah rekomendasi pada Triwulan ke I sesuai dengan aplikasi Sidak Irjen dengan nomor R.151/ITJ.4/HP.470/VII/2024 Hasil Evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2024 - 2024 pada Balai Besar KIPM Jakarta I Provinsi Banten dari 7 rekomendasi telah di tindak lanjut dengan tuntas tidak ada rekomendasi pengambalian uang atau TGR ,maka dengan indikator dalam dasborad sidak sudah 100% atau untuk Triwulan Ke IV sudah di tindak lanjut semuanya .

No	Tipe	Subj	Revisi	Revisi	Revisi	Revisi	Status	Aksi
427520	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA I	Revisi	04.4.1/ITJ.4/HP.380/IV/2021	2021-04-04	Hasil Revisi atas Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh TA 2020 di Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BBKIPM) Jakarta I	TUNTAS	Q Detail	
427520	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA I	Pemantauan	R. 42/ITJ.4/HP.550/III/2022	2022-02-16	Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan PBJ serta Revisi Pemenuhan Dokumen Untuk Mendukung Pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) TA 2021 di Balai Besar KIPM Jakarta I	TUNTAS	Q Detail	
427520	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA I	Audit	R. 102/ITJ.4/HP.240/VI/2022	2022-05-17	Hasil Prohiby Audit Tahap Perencanaan Pembangunan Warehouse Tahun 2022 pada Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai Besar KIPM) Jakarta I, Provinsi Banten	TUNTAS	Q Detail	
427520	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA I	Evaluasi	R. 211/ITJ.4/HP.440/IX/2022	2022-09-14	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021-2022 pada Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I Provinsi Banten	TUNTAS	Q Detail	
427520	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA I	Revisi	R. 289/ITJ.4/HP.380/IX/2022	2022-12-14	Hasil Revisi Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Warehouse TA 2022 pada Balai Besar KIPM Jakarta I Provinsi Banten	TUNTAS	Q Detail	
427520	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA I	Audit	R.60/ITJ.4/HP.130/III/2023	2023-03-20	Hasil Audit Kinerja Tahun 2022 pada Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I, Provinsi Banten	TUNTAS	Q Detail	
427520	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA I	Evaluasi	R.128/ITJ.4/HP.430/VI/2023	2023-06-09	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik pada Balai Besar KIPM Jakarta I, di Provinsi Banten	TUNTAS	Q Detail	
427520	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA I	Evaluasi	R.151/ITJ.4/HP.470/VII/2023	2023-07-03	Hasil Evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2022 - 2023 pada Balai Besar KIPM Jakarta I Provinsi Banten	TUNTAS	Q Detail	



Gambar 7. Dashboard Sidak Rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal KKP Balai Besar KIPM Jakarta I Tahun 2024

Kegiatan-4 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup BPPMHKP											
Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BPPMHKP											
Realisasi Tahun 2023		Realisasi Tahun 2024							Renstra BPPMHKP 2020-2024		
TW IV	2023	Realisasi TW Sebelumnya (TW III 2024)	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2021	Target PK 2024	%Realisasi thd Target PK	Target 2023	Target 2024	%Capaian thd Target Restra
100	120%	100	75	100	100	-	100	100	100	100	120

Tabel 25. Target dan Realisasi IKK 21 pada TahunanTahun 2024

1. Capaian IKU

IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I periode pengukuran dan pelaporan capaian Tahunan. Pada tahun 2024, IKU telah mencapai target triwulan ke I 100% dikarenakan pada triwulan pertama belum ada audit dari Irjen maka data yang di pake berdasarkan data yang tertera di

aplikasi SIDAK

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Pada Tahun 2024 BBPPMHKP Jakarta I temuan Itjen KKP. Pemantauan tindak lanjut temuan Itjen dengan 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan.

IKK 22 . Nilai IKPA lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I dalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indikator tersebut dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/ dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER 4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA. Realisasi indikator ini pada Tahun 2024 dihitung dengan konversi bobot berdasarkan evaluasi terhadap aspek kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, aspek kepatuhan terhadap regulasi, aspek efektivitas terhadap terhadap kegiatan dan efisiensi pelaksanaan yang dilakukan oleh Biro Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Formula pengukuran capaian IKK ini dilakukan atas penilaian dari berbagai aspek yaitu :

$$\begin{aligned} & \text{Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran} \\ & = \Sigma a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l + m \end{aligned}$$

- a. Untuk Tahunan, II, III perhitungan $a+b+c+d+e+f+g+h+i+j$
- b. Untuk Tahunan perhitungan $a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m$

1. Revisi DIPA

- a. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (tidak masuk adalah revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif).
- b. Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulan. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2x revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi yang dilakukan antara lain :
 - Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar sangat selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap).
 - Satker agar dapat mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan baik kepada DJA maupun Kanwil DJPb sebanyak 1 kali dalam 1 triwulan.
- c. Formula : $\frac{\Sigma \text{Target Revisi DIPA}}{\Sigma \text{Revisi DIPA}}$

(Semakin rendah angka persentase revisi DIPA yang diperoleh, maka semakin baik kinerja perencanaan anggaran pada K/L tersebut) Sampai dengan Semester I revisi telah 3 kali sesuai dari Monev PA pada aplikasi Onspan nilai dari revisi DIPA 100 bobot 10 nilai akhir 10.00 dengan nilai akhir aspek 87,64 Sampai dengan Semester I untuk revisi DIPA sudah 4 kali revisi dari target 8 kali Revisi

Jadi bisa hitung $8 \text{ Jumlah Target} / 4 \text{ revisi} = 4$

2. Deviasi Halaman III DIPA

- a. Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan sepanjang Tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker.
- b. Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA.
- c. Keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan November Tahun anggaran berjalan Rencana aksi yang dilakukan antara lain :
 - Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, seluruh satker yang

memiliki deviasi tinggi, agar melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi

anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan.

- Satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker.

d. Formula :
$$\frac{\text{Realisasi Penarikan dana-Perencanaan Hal III DIPA}}{\text{Perencanaan Hal III DIPA}}$$

(Semakin rendah persentase deviasi (angka absolut) yang diperoleh, maka semakin baik kualitas rencana penarikan halaman III DIPA dan kinerja realisasi anggaran K/L) sampai dengan semester I Deviasi halaman III DIPA sesuai dengan Monev PA pada aplikasi Onspan dengan nilai 75,27 nilai Bobot 10, Nilai Akhir 7,53 dan nilai aspek 87,64

3. Pengelolaan UP

- SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran.
- Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah). Laporan Kinerja – Tahun 2024
- Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai realisasi anggaran. Rencana aksi yang dilakukan antara lain :

Seluruh satker agar memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan ke KPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.

- satker agar memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan ke KPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.

• Formula :
$$\frac{\Sigma \text{SPM GUP yang disampaikan tepat waktu}}{\Sigma \text{SPM GUP}} \times 100$$

(Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja pengelolaan UP)

Penyerapan Anggaran	
Nilai	100.00
Bobot	10
Nilai Akhir	10.00

nilai pengelolaan UP sesuai dengan Monev PA pada aplikasi Onspan dengan nilai 100.00 bobot dengan nilai 10 nilai akhir 10.00 nilai Aspek 97.11

Sampai dengan Semester I pengelolaan UP sudah di sampai sesuai dengan waktu 5 hari kerja dengan demikian dapat di hitung

- a. LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggung jawaban atas uang yang dikelola.
- b. LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN.
- c. Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT, dan terhitung sejak Satker pertama kali melakukan upload tersebut Rencana aksi yang dilakukan antara lain :
 - Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dan memastikan data LPJ telah terverifikasi oleh KPPN pada Aplikasi SPRINT

d. Formula : $\frac{\sum \text{Data LPJ Bendahara yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{LPJ Bendahara yang disampaikan ke KPPN}} \times 100$

(Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja penyampaian LPJ Bendahara)

LPJ Bendahara	
Nilai	100
Bobot	10
Nilai Akhir	10.00

nilai pengelolaan UP sesuai dengan Monev PA pada aplikasi Onspan dengan nilai 100 bobot = 10 nilai akhir 10,00

➤ Formula : $\frac{\sum \text{Data Kontrak yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{Data Kontrak yang disampaikan ke KPPN}} \times 100$

- 5 (Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja penyampaian data kontrak)

Belanja Kontraktual	
Nilai	100
Bobot	10
Nilai Akhir	10.00

nilai pengelolaan UP sesuai dengan Monev PA pada aplikasi Onspan dengan

nilai 100 bobot = 10 nilai akhir 10,00

6. Penyelesaian Tagihan

- a. Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual NonBelanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengannilai kontrak di atas Rp 200 Juta).
- b. Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat-lambatnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM tagihan dimaksud ke KPPN. Rencana aksi yang dilakukan antara lain :
 - Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkankedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual(LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda- tangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP.

c. Formula $\frac{\Sigma \text{Tagihan yang disampaikan tepat waktu}}{\Sigma \text{Total Tagihan}} \times 100$

(Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja penyelesaian tagihannya)

a

Penyelesaian Tagihan	
Nilai	100
Bobot	10
Nilai Akhir	10.00

nilai pengelolaan UP sesuai dengan Monev PA pada aplikasi Onspan dengan nilai 100 bobot = 10 nilai akhir 10,00

7. Penyerapan Anggaran a. Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: (15%), Tahunan(40%), (60%), dan (90%). b. Pagu anggaran pembagi dihitung sebagai pagu efektif, dimana pagu anggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain :

- Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar senantiasa memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif.

- Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir Tahun.

$$\text{Formula} : \frac{\Sigma \text{ Tagihan yang disampaikan tepat waktu}}{\Sigma \text{ Total Tagihan}} \times 100$$

(Penyerapan anggaran yang dapat mencapai target, maka nilainya semakin baik)

Penyelesaian Tagihan	
Nilai	85.53
Bobot	20
Nilai Akhir	17.11

nilai pengelolaan UP sesuai dengan Money PA pada aplikasi Onspan dengan nilai 85.53 bobot = 20 nilai akhir 17.11

8. Retur SP2D a. Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D total yang telah terbit. b. Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain :

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan
- ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank Pihak Ketiga/ penerima pembayaran.
- Diperlukan proses konfirmasi atas status aktif rekening penerima. Apabila terjadi retur SP2D, satker agar berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaiannya tidak lebih dari 7 hari kerja

$$\text{Formula} : \frac{\Sigma \text{Retur SP2D}}{\Sigma \text{ SP2D terbit}} \times 100$$

(Semakin rendah persentase retur SP2D yang diperoleh, maka semakin baik kualitas SPM yang diajukan ke KPPN) Semester I belum ada retur SP2D dari semua kegiatan

9. Perencanaan Kas

- a. Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian renkas/ RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi besar (Diatas Rp 1 Miliar).
- b. Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara yang terencana dan terkendali. Rencana aksi yang dilakukan antara lain :
- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian Renkas (RPD Harian) untuk transaksi pencairan dana dalam kategori besar (> Rp 1 Miliar) yang memerlukan penyampaian renkas dengan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak tanggal APS pada Aplikasi SAS sampai dengan pengajuan

SPM ke KPPN.

c. Formula : $\frac{\Sigma \text{ Data Renkas yang disampaikan tepat waktu}}{\Sigma \text{ Data Renkas yang disampaikan ke KPPN}} \times 100$

(Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja kesesuaian pengajuan SPM dengan Renkas/RPD harian)

10. Pengembalian/Kesalahan SPM

a. Indikator ini dihitung dari besaran/ jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN. Sampai dengan Semester I jumlah kesalahan SPM dapat di hitung : Januari 1 SPM, Februari 2 SPM, April 3 SPM, Mei 1 SPM dan Juni 1 SPM

b. Formula : $\frac{\Sigma \text{ SPM Salah}}{\Sigma \text{ Data Renkas yang disampaikan ke KPPN}} \times 100$

11. Dispensasi Penyampaian SPM (rumus)

a. Formula: $\frac{\Sigma \text{ Dispensasi SPM}}{\Sigma \text{ PAGU}} \times 100$

(Semakin rendah % pengajuan dispensasi SPM, maka semakin baik kinerja indikator dispensasi pengajuan SPM). Tidak ada penyampaian Dispensasi SPM selama Semester I

12. Pagu Minus (rumus)

a. Formula : $\frac{\Sigma \text{ PAGU minus}}{\Sigma \text{ PAGU}} \times 100$

(Semakin rendah angka persentase pagu minus yang diperoleh, maka semakin baik kinerja perencanaan anggaran Belanja Pegawai pada K/L tersebut)

Konfirmasi Capaian Output

- Konfirmasi capaian Output (KCO) Dihitung berdasarkan rasio antara jumlah output yang terkonfirmasi terhadap seluruh output yang dikelola Satker

- Rasio Konfirmasi capaian Output (RKCO) dihitung setiap Bulan, dengan Nilai IKPA tiap bulannya merupakan rata-rata nilai RKCO sampai dengan bulan berkenaan

- Data KCO merupakan data yang dihasilkan dari proses input Capaian Output pada aplikasi SAS atau Sakti yang telah terkonfirmasi dalam

Untuk Tahunan atau Semester I Tahun 2024 IKK nilai IKPA lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I di sampaikan sebagai berikut :

Kegiatan-4 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup BPPMHKP											
Nilai IKPA lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I											
Realisasi Tahun 2023		Realisasi Tahun 2024							Renstra BPPMHKP 2020-2024		
TW IV	2023	Realisasi TW Sebelumnya (TW III 2024)	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2023	Target PK 2024	%Realisasi thd Target PK	Target 2023	Target 2024	%Capaian thd Target Restra
93,75	10,44	93,75	93	94	100,44	100	93	100	93,75	93	100

Tabel 26. Target dan Realisasi IKK 22 pada Tahun 2024

1. Capaian IKU

Belum ada Penilai pada Triwulan ke I

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

IKK 23. Nilai Kinerja Anggaran BPPMHKP lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/ PMK.02/2021.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing.

Formula penghitungan IKK ini adalah :

$$NK=(P \times Wp)+ (K \times Wk)+ (PK \times Wpk)+ (E \times WE)$$

Nilai Kinerja aspek implementasi :

P : dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker (Bobot Penyerapan Anggaran (WP) =9,7%)

K : antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker

dengan jumlah

bulan (Bobot Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi (WK)=18,2%)

PK : dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran (Bobot Pencapaian Keluaran (WPK) =43,5%)

E : dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot Efisiensi (WE) =28,6%)

Tabel 27. Target dan Realisasi IKK 23 pada TahunanTahun 2024

Untuk perbaikan pelaksanaan anggaran Balai Besar KIPM Jakarta I tahun berikutnya, beberapa langkah strategis yang dilakukan antara lain :

1. Memastikan semua kegiatan segera dilaksanakan
2. Kegiatan yang sudah rutin untuk kegiatan teknis untuk pertanggung jawaban segera di laporkan
3. Melakukan penyesuaian terhadap perencanaan dengan pelaksanaan anggaran melalui :

Kegiatan-4 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup BPPMHKP											
IK-23 Nilai Kinerja Anggaran BPPMHKP Jakarta I											
Realisasi Tahun 2023		Realisasi Tahun 2024							Renstra BPPMHKP 2020-2024		
TW IV	2023	Realisasi TW Sebelumnya (TW III 2023)	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2023	Target PK 2024	%Realisasi thd Target PK	Target 2023	Target 2024	%Capaian thd Target Restra
82	105	82	82	82	86,76	100	82	100	82	82	100

- a. Melakukan revisi DIPA apabila ada perubahan kebijakan program/ kegiatan;
 - b.
 - c. Mempersiapkan dokumen terkait dan mengusulkan revisi DIPA apabila terdapat blokir anggaran;
 - d. Memastikan alokasi pagu anggaran tersedia dan tidak melakukan revisi yang
 - e. berakibat padapengurangan alokasi pagu yang sudah dikontrakan;
 - f. Melakukan revisi anggaran apabila terjadi pagu minus.
4. Menyusun dan menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran melalui percepatan penyusunan penyelesaian dokumen pendukung (dokumen pengadaan barang/jasa).
 5. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran melalui :
 - a. Mengajukan UP secara rasional sesuai kebutuhan operasional bulanan Satker dengan mengoptimalkan LS dan revolving UP;
 - b. Memastikan penyampaian laporan keuangan telah lengkap, benar dan tepat waktu;
 - c. Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data keuangan dan dokumen pembayaran.
 6. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan melalui :
 - a. Menyelesaikan tagihan yang telah selesai terminnya atau telah selesai pelaksanaannya;
 - b. Memberikan teguran kepada Pejabat Perbendaharaan Satker yang terlambat menyelesaikan tagihan;
 - c. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proposional berdasarkan Rencana Penarikan Dana(RPD);
 - d. Memastikan dokumen pembayaran telah benar.
 7. Mendorong efisiensi pelaksanaan kegiatan melalui pengajuan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu.
 8. Meningkatkan ketertiban penyampaian data supplier dan data kontrak melalui;
 - a. Menandatangani kontrak pengadaan dan menyampaikan data kontrak termasuk addendum kontrak ke KPPN;
 - b. Meningkatkan koordinasi antar pejabat Perbendaharaan dengan KPPN

IKK. 24 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa BPPMHKP lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I

Berdasarkan hasil pengawasan BPK RI dan Itjen KKP, diketahui bahwa beberapa temuan berulang pada Unit Eselon I lingkup KKP setiap tahunnya terkait dengan pengadaan barang/jasa, sehingga dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkup KKP, Itjen KKP telah menetapkan indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP sejak Tahun 2021.

Pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan bagian dari aktivitas pembangunan yang rutin dilaksanakan oleh instansi pemerintah setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengendalian karena seringkali bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengendalian yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur dan aturan yang berlaku IKK ini suatu ukuran untuk menggambarkan kualitas kinerja pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Balai Besar KIPM Jakarta I.

Pengukuran dilaksanakan secara tahunan berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur dengan perhitungan sebagai berikut :

Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%) + Persentase sejumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%) + Laporan penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa (20%) + Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Untuk Tahun 2024 IKK tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I belum dapat dinilai dikarenakan perhitungannya dilakukan tahunan.

Kegiatan-4 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup BPPMHKP											
IK-23 Nilai Kinerja Anggaran BPPMHKP Jakarta I											
Realisasi Tahun 2023		Realisasi Tahun 2024							Renstra BPPMHKP 2020-2024		
TW IV	2023	Realisasi TW Sebelumnya (TW III 2024)	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2023	Target PK 2024	%Realisasi thd Target PK	Target 2023	Target 2024	%Capaian thd Target Restra
77,50	120	100	77,50	100	120	100	77,50	100	77,50	77,50	100

Tabel 28. Target dan Realisasi IKK 24 pada Tahun 2024

Faktor pendukung keberhasilan tercapainya target IKK ini antara lain : kepatuhan admin SIRUP dalam mengupload rencana umum pengadaan barang/jasa pada aplikasi SIRUP, kompetensi pokja PBJ dalam proses pengadaan barang/jasa, kepatuhan Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaporkan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, dan komitmen POKJA dan pejabat pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Faktor penghambat dalam pencapaian target IKK dengan berlakunya TKDN maka setiap pengadaan barang harus mengusulkan TKDN untuk persetujuan dari pusat

IKK. 25 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BPPMHKP lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan. Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti dengan berbagai hambatan/permasalahan, dan bahkan menjadi temuan berulang aparat pengawasan internal maupun eksternal. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP lingkup Balai Besar Jakarta I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur yaitu :

Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (bobot 10%) + Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%) + Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2021 (bobot 20%) + Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%) + Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepatwaktu (bobot 20%).

Untuk Tahun 2024 IKK tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I belum dapat dinilai dikarenakan perhitungannya dilakukan tahunan

Tabel 29. Target dan Realisasi IKK 25 pada Tahun 2024

Faktor pendukung keberhasilan tercapainya target IKK ini antara lain kecermatan penyusunan rencana kebutuhan BMN dan penyusunan anggaran, kepatuhan dalam pengusulan dokumen PSP, Dukungan KPKNL dalam melaksanakan Revaluasi Aset, Pengadaan BMN yang sesuai dengan kebutuhan

Kegiatan-4 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup BPPMHKP											
Realisasi Tahun 2023		Realisasi Tahun 2024							Renstra BPPMHKP 2020-2024		
TW IV	2023	Realisasi TW Sebelumnya (TW Iv2023)	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2023	Target PK 2024	%Realisasi thd Target PK	Target 2024	Target 2024	%Capaian thd Target Restra
77,50	120	100	77,50	100	120	77,50	77,50	100		77,50	100

sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal, serta kepatuhan dalam penyusunan laporan BMN baik semesteran maupun tahunan.

Faktor penghambat dalam pencapaian target IKK ini adalah Pengadaan BMN yang kadang kala belum sesuai dengan RKBMN yang telah disusun. Hal ini disebabkan tidak tersedianya anggaran Pengadaan BMN yang sesuai dalam RKBMN ketika dalam penyusunan anggaran pada tahun berkenaan.

2.5 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Balai Besar KIPM Jakarta I pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 21.505.920.000,-. Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp 16.139.365.000,- dan PNPB sebesar Rp. 5.366.555.000,-. Realisasi penyerapan anggaran Balai Besar KIPM Jakarta I pada Tahunan Tahun 2024 Rp 21,015.930.419 ,- atau

97,72% dari pagu anggaran Balai Besar KIPM Jakarta I Tahun 2024. Realisasi penyerapan anggaran Balai Besar KIPM Jakarta I Tahun 2024 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 30 dan Tabel 31.

Tabel 30. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2024

Jenis Belanja	Pagu	Persentase	Realisasi
Belanja pegawai	10,249,576,000	98.80%	10,126,277,750
Belanja Barang	7,490,378,000	95.57%	7,158,727,669
Belanja Modal	3,765,966,000	99.07%	3,730,925,000
Total	21,505,920,000	97.72%	15,720,091,892

Tabel 31. Penyerapan Anggaran per Kegiatan Tahun 2024

Kegiatan	Pagu	Persentase	Realisasi
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPMHKP	10,249,576,000	98.80%	10,126,277,750
Karantina Ikan	1,136,040,000	96.04%	1,091,060,319
Pengendalian Mutu	436,900,000	92.29%	403,225,044
Standardisasi Sistem dan Kepatuhan			
TOTAL	21,505,920,000	97.72%	21,015,930,419

NO	KODE NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA										TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER		
1	427520 BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA I	PAGU	10,249,576,000	7,490,378,000	3,765,966,000	0	0	0	0	0	0	0	21,505,920,000
		REALISASI	10,126,277,750	7,158,727,669	3,730,925,000	0	0	0	0	0	0	0	21,015,930,419
			(98.80%)	(95.57%)	(99.07%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(97.72%)
GRAND TOTAL		SISA	123,298,250	331,650,331	35,041,000	0	0	0	0	0	0	0	489,989,581
		PAGU	10,249,576,000	7,490,378,000	3,765,966,000	0	0	0	0	0	0	0	21,505,920,000
		REALISASI	10,126,277,750	7,158,727,669	3,730,925,000	0	0	0	0	0	0	0	21,015,930,419
		(98.80%)	(95.57%)	(99.07%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(97.72%)	
		SISA	123,298,250	331,650,331	35,041,000	0	0	0	0	0	0	489,989,581	

Realisasi penyerapan anggaran Balai Besar KIPM Jakarta I Tahun 2024 telah digunakan dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis dan IKK. Realisasi penyerapan anggaran per kegiatan terbesar ada pada kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Lainnya BPPMHKP sebesar **(97.74%)**, dilanjutkan dengan kegiatan karantina ikan sebesar **(98.51%)** kegiatan pengendalian mutu sebesar **(79.95%)** dan standardisasi sistem dan kepatuhan sebesar **(97.72%)**.

2.6 FISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN

Pengukuran efisiensi pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut, efisiensi anggaran dipandang perlu untuk dilakukan dan dihitung dengan

$$E = \frac{\sum (PAK_i \times CK_i) - RAK_i}{\sum (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

E = Efisiensi
PAK_i = Pagu anggaran keluaran *i*
RAK_i = Realisasi anggaran keluaran *i*
CAK_i = Capaian keluaran *i*

menggunakan formulasi sesuai PMK Nomor 214 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai berikut :

Dari hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai efisiensi dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu skala nilai yang berkisar antar 0% sampai dengan 100%, dengan rumus transformasi sebagai berikut :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

NE = Nilai Efisiensi
E = Efisiensi

Pada Triwulan Ke IV dengan nilai realisasi anggaran sampai sekarang dapat di hitung nilai Efisiensi sebagai berikut :

Perhitungan Evaluasi Kinerja Anggaran

$$E = \frac{(21,505,920,000 \times 97,72\%) - 21,015,930,419}{21,015,930,419} \times 100\%$$

$$= 0,99\% \text{ (Efisiensi)}$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{0,99\% \times 50}{20} \right)$$

$$= 97,72\%$$

Dengan menggunakan formulasi tersebut, diperoleh angka efisiensi anggaran Balai Besar

Mengacu pada hasil pengukuran efisiensi tersebut, kemudian ditransformasikan

sehingga diperoleh angka nilai efisiensi anggaran Balai Besar KIPM Jakarta I sebesar 97,72% dari skala maksimal 100%. Hal ini membuktikan Balai Besar KIPM Jakarta I sebagai salah satu unit kerja teknis di lingkungan BPPMHKP telah melakukan efisiensi anggaran dan termasuk dalam kategori cukup baik.

**BA
B III
PEN
UTU
P**

3.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Balai Besar KIPM Jakarta I TahunanTahun 2024 menyajikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Balai Besar KIPM Jakarta I pada Tahun Anggaran 2024, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Terhadap capaian IKK tersebut dilakukan perbandingan terhadap target tahunan sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan selamasatu tahun.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Balai Besar KIPM Jakarta I TahunanTahun 2024 dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain : Secara umum rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Balai Besar KIPM Jakarta I Tahun 2024 sebesar 106,69 (kategori baik). Dari 25 IKK, terdapat 1 IKK yang tidak di hitung dalam Tahunanandi karenakan sudah tercapai sebelum triwulan ke IV dan terdapat IKK yang capaiannya di atas 120% (kategori anomali) yaitu IKK, 1.Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup Balai Besar KIPM Jakarta I dan Lokasi Sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai Besar KIPM Jakarta I (Lokasi)

3.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Balai Besar KIPM Jakarta I pada Tahun 2024, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal

Kegiatan setiap IKK sudah sesuai dengan target nya masing-masing serta anggaran yang sesuai dengan kegiatan dalam 1 tahun ada beberpa kegiatan IKK mengalami penurunan nilai di bandingkan dengan tahun kemarin di karenkan ada perubahan metode penilaian



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Klasifikasi Pendidikan ASN

1	Orang	Strata 3 (Doktor)
16	Orang	Strata 2 (Magister)
22	Orang	Strata 1 (Sarjana)
7	Orang	Diploma 4
15	Orang	Diploma 3
9	Orang	SLTA / SUPM
Jumlah : 70 orang		

Sebaran Jabatan

2	Orang	STRUKTURAL
2	Orang	PHPI Ahli Madya
1	Orang	Inspektur Mutu Ahli Madya
1	Orang	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya
24	Orang	PHPI Ahli Muda
1	Orang	Pranata Komputer Ahli Muda
2	Orang	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
5	Orang	PHPI Ahli Pertama
5	Orang	PHPI Terampil Penyelia
8	Orang	PHPI Terampil Pelaksana Lanjutan
5	Orang	PHPI Terampil Pelaksana
1	Orang	Pengawas Mutu Pelaksana

1	Orang	Pranata Komputer Ahli Pertama
1	Orang	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
1	Orang	Arsiparis Pertama
1	Orang	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
1	Orang	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Penyelia
1	Orang	Pranata Keuangan APBN Terampil
6	Orang	Fungsional Umum
22	Orang	Tenaga Kontrak

Jumlah
Keseluruhan | **92 orang**

ASN	70 orang
NON ASN	22 orang

BALAI BESAR KIPM JAKARTA I



SATUAN KERJA **BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA**

SIDAK KKP
Susiana, SE

PENGAWASAN

BERANDA

MANAGE TLHP

TUTORIAL

Nilai Temuan Keuangan

Total Nilai Temuan Hasil Pengawasan
Rp61,729,668.00

Setoran Ke Kas Negara Tuntas per 16 Oct 2023
Rp61,729,668.00 Prosentase: 100.00%

Sisa temuan keuangan yang belum tuntas per 16 Oct 2023
Rp0.00 0.00%

NOTE:
 Segera lakukan proses tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern Inspektorat Jenderal yang dapat dilaksanakan secara online. Kirim bukti tindak lanjut dengan mengupload dokumen bukti ke dalam sistem aplikasi SIDAK melalui Menu Manage TLHP.

Profil Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Daftar LHP
Change Password
Logout

CAPAIAN TLHP



100% 100%

STATUS: IKU Success

Laporan Hasil Pengawasan

JUMLAH LHP : 11

Kategori	Jumlah
LHP BAB	: 4 LHP
LHP SURAT	: 7 LHP
CHR	: 0 CHR
NOTA DINAS	: 0 DOK

Temuan Hasil Pengawasan

JUMLAH KEJADIAN : 39

Kategori	Jumlah
Kepatuhan	: 11 Temuan
Kelemahan SPI	: 25 Temuan
Temuan 3-E	: 3 Temuan

Rekomendasi/Saran

JUMLAH REKOM/SARAN : 66

Kategori	Jumlah
Tuntas	: 66 Rekom
Proses	: 0 Rekom
Pending	: 0 Rekom
RTDD	: 0 Rekom

No.	Tanggal Kejadian	Uraian Kasus Pelanggaran	Komoditi/ Media Pembawa	Jumlah	Satuan	Nilai Total yang Diselamatkann (Rupiah)
1.	13/01/2024 Domestik Keluar (LI.001)	Ditemukan 7 ekor Lobster (Panulirus spp.) dalam kondisi bertelur pada saat dilakukan pemeriksaan kesesuaian jumlah dan jenis pada tanggal 13 Januari 2024 atas nama pengirim Riyadi.	Lobster bertelur	7	Ekor	3.500.000
2.	18/01/2024 Ekspor (LI.002)	Terjadi upaya pengeluaran Kepiting dengan ukuran Karapas dibawah 12 cm sebanyak 803 (Delapan Ratus Tiga) ekor pada tanggal 18 Januari 2024 tujuan China	Kepiting Undersize	803	Ekor	40.150.000
3.	21/01/2024 Ekspor (LI.003)	Terjadi upaya pengeluaran Kepiting (Scylla serrata) dengan ukuran karapas dibawah 12 cm sebanyak 106 ekor atas nama CV. Bumi Pertiwi pada tanggal 21 Januari 2024 tujuan China	Kepiting Undersize	106	Ekor	5.300.000
4. k	21/01/2024 Ekspor (LI.004)	Terjadi upaya pengeluaran Kepiting (Scylla serrata) dengan ukuran Karapas dibawah 12 cm sebanyak 171 ekor atas nama CV. Muara Laut pada tanggal 21 Januari 2024 tujuan China	Kepiting Undersize	171	Ekor	8.550.000
5.	23/01/2024 Ekspor (LI.005)	Terjadi upaya pengeluaran Kepiting (Scylla serrata) dengan ukuran karapas dibawah 12 cm sebanyak 489 ekor atas nama CV. Muara Laut pada tanggal 23 Januari 2024 tujuan China	Kepiting Undersize	489	Ekor	24.450.000
6.	23/01/2024 Ekspor (LI.006)	Terjadi upaya pengeluaran Kepiting (Scylla serrata) dengan ukuran Karapas dibawah 12 cm sebanyak 66 ekor atas nama CV. Bumi Pertiwi pada tanggal 23 Januari 2024 tujuan China	Kepiting Undersize	66	Ekor	3.300.000
7.	28/02/2024 Ekspor (LI.007)	Upaya pengeluaran Kepiting dengan ukuran karapas dibawah 12 cm sebanyak 210 ekor yang dikemas dalam 21 box styrofoam atas nama CV. Muara Laut tujuan Shanghai, China pada tanggal 28 Februari 2024	Kepiting Undersize	210	Ekor	10.500.000
8.	29/03/2024 Domestik Masuk (LI.008)	Upaya Pemasukan Kepiting dengan ukuran karapas dibawah 12 cm sebanyak 105 ekor yang dikemas dalam 1 box styrofoam asal Timika atas nama Muhammad Jusman pada tanggal 29 Maret 2024	Kepiting Undersize	105	Ekor	3.150.000
9.	01/04/2024 Domestik Masuk (LI.009)	Upaya Pemasukan Kepiting dengan ukuran karapas dibawah 12 cm sebanyak 283 ekor yang dikemas dalam 3 box styrofoam asal Manokwari atas nama Asnawir pada tanggal 1 April 2024	Kepiting Undersize	283	Ekor	8.490.000
10.	01/04/2024 Domestik Masuk (LI.0010)	Upaya Pemasukan Kepiting dengan ukuran karapas dibawah 12 cm sebanyak 95 ekor yang dikemas dalam 3 box styrofoam asal Manokwari atas nama Sa Lie pada tanggal 1 April 2024	Kepiting Undersize	95	Ekor	2.850.000
11.	28/04/2024 Ekspor (LI.011)	Serah terima BBL untuk dilepasliarkan hasil penangkapan POLRESTA BANDARA SOETTA pada tanggal 27 April 2024 ekor di kawasan pantai PSPL Serang- Banten	Benih Bening Lobster	38.400	ekor	4,1 M
12.	04/06/2024 Ekspor (LI.012)	Penggagalan Upaya Pengeluaran Benih Bening Lobster sebanyak 41.720 ekor dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tujuan Singapura melalui pintu pengeluaran Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten oleh Tim Tipidter Bareskrim Polri pada tanggal 04 Juni 2024	Benih Bening Lobster	41.720	ekor	3.754.800.000
13.	18/07/2024 Ekspor (LI.013)	Penggagalan Upaya Pengeluaran Benih Bening Lobster sebanyak 62.867 ekor dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tujuan Vietnam, Penangkakan dilakukan di area parkir Terminal 2 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten oleh Tim Tipidter Bareskrim Polri pada tanggal 18 Juli 2024	Benih Bening Lobster	62.867	ekor	5.658.030.000

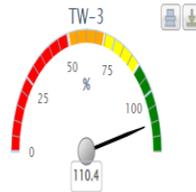
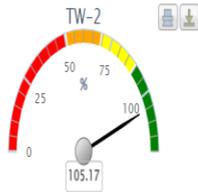
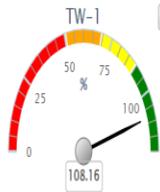
14	29/07/2024 Ekspor (LI.014)	Penggagalan Upaya Pengeluaran Benih Bening Lobster sebanyak 34.222 ekor dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tujuan Singapore, melalui Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten oleh KPU Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 29 Juli 2024 dan diserahkan kepada petugas Balai Besar KIPM Jakarta I	Benih Bening Lobster	34.222	ekor	3.079.980.000
15	25/07/2024 Impor (LI.015)	Penggagalan upaya pemasukan Live Coral sebanyak 6 Pcs asal Hongkong melalui pintu pemasukan Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno Hatta yang dibawa oleh seorang penumpang bernama FRENDY SUTANTO pada Selasa, 25 Juli 2024. Peggagaln dilakukan oleh Petugas AVSEC berkoordinasi dengan petugas Balai Besar KIPM Jakarta I	Live Coral	6	pcs	6.294.000
16.	06/09/2024 Ekspor (LI.016)	Penggagalan upaya pengeluaran Benih Bening Lobster sebanyak 174.089 ekor yang terdiri dari 165.327 ekor jenis Benih Bening Lobster Pasir (<i>Panulirus ornatus</i>) dan 8.762 ekor jenis Benih Bening Lobster Mutiara (<i>Panulirus homarus</i>) melalu pintu pengeluaran Terminal 2F Keberangkatan Internasional Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang-Banten.	Benih Bening Lobster	174.089	ekor	15.668.010.000
17.	14/09/2024 Ekspor (LI.017)	Penggagalan Upaya pengeluaran Benih Bening Lobster sebanyak 63.400 ekor di Pintu pengeluaran Terminal 2 F Keberangkatan Internasional Bandara Internasional Soekarno Hatta pada tanggal 14 September 2024 tujuan Singapura yang dibawa terduga penumpang Sdri. Novianty dan Santosa (Santosa masih dalam penyelidikan). Peggagalan dilakukan berkat koordinasi antara Avian Security, KPU Bea dan Cukai Type C, Polresta Bandara Int'l Soekarno Hatta dan Balai Besar KIPM Jakarta I	Benih Bening Lobster	63.400	ekor	5.706.000.000

Unit Kerja

1011000000 - BALAI BESAR KIPM JAKARTA I

Tahun

2023



Capaian Kinerja IKU + IKM

TW1	TW2	s/d TW2	TW3	s/d TW3	TW4	s/d TW4
108,16 Q	105,17 Q	105,42	110,40 Q	110,25	103,56 Q	106,69

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

REKAP UPI DAN SERTIFIKASI HACCP RUANG LINGKUP PRODUK
WILAYAH BALAI BESAR KIPM JAKARTA I TRIWULAN II
TAHUN 2023

UPI : 21
SERTIFIKAT HACCP PRODUK : 71

NO	NAMA UPI	ALAMAT	NO	RUANG LINGKUP PRODUK	NO. SERTIFIKAT	GRADE	STATUS PRODUK
1	ALAM LAUT, CV	Pergudangan Bandara Ilex Blok M No. 20, Kial. Selapojang Jaya, Kec. Nagasari, Kota Tangerang, Banten - Indonesia	1	Dried Fish Maw	287.P/M/HACCP/PK/D/2.3	C	Perpanjangan
			2	Dried Salted Fish	288.P/M/HACCP/PK/D/2.3	C	Perpanjangan
			3	Dried Sea Cucumber	289.P/M/HACCP/PK/D/2.3	C	Perpanjangan
			4	Dried Shark (Fin, Skin, Bone)	290.P/M/HACCP/PK/D/2.3	C	Perpanjangan
			5	Prash Demersal Fish	181.P/M/HACCP/PS/D/2.3	C	Perpanjangan
			6	Bonek Damar Fish	163.P/M/HACCP/PS/D/2.3	C	Perpanjangan

			65	Dried Stingray (Fin, Skin, Bone)	040/P/M/H/ACCP/PK/04/2.3	B	Perpanjangan
20	VESSEL FRESH FISH INDOMAKMURA, PT	Komplek Industri Jatika, Jl. Industri Raya II Blok J No. 5 Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten - Indonesia	66	Frozen Shark	062/P/M/H/ACCP/PB/06/2.2	B	Monitoring dan evaluasi
21	YFIN INTERNATIONAL, PT	Komplek Pergudangan Sentra Kosambi Blok G2 No. F Room 1, Jl. Salembaran Raya Dadap Tangerang, Banten - Indonesia	65	Frozen Cephalopods	317/P/M/H/ACCP/PB/04/2.3	B	Perpanjangan
			66	Frozen Demersal Fish	318/P/M/H/ACCP/PB/04/2.3	B	Perpanjangan
			67	Frozen Milkfish	200/P/M/H/ACCP/PB/06/2.3	B	Perpanjangan
			68	Frozen Pelagic Fish	319/P/M/H/ACCP/PB/04/2.3	B	Perpanjangan
			69	Frozen Shark	201/P/M/H/ACCP/PB/06/2.3	B	Perpanjangan
			70	Frozen Shrimp	202/P/M/H/ACCP/PB/06/2.3	B	Perpanjangan
			71	Frozen Tuna	320/P/M/H/ACCP/PB/04/2.3	B	Penambahan Ruang Lingkup

Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja



TIDAK ADA FILTER

CARI DI HALAMAN... Q

NO	KODE NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA									TOTAL	
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER		
1	427520 BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA I	PAGU	10,249,576,000	7,490,378,000	3,765,966,000	0	0	0	0	0	0	0	21,505,920,000
		REALISASI	10,126,277,750 (98.80%)	7,158,727,669 (95.57%)	3,730,925,000 (99.07%)	0 0.00%	21,015,930,419 (97.72%)						
		SISA	123,298,250	331,650,331	35,041,000	0	0	0	0	0	0	0	489,989,581
GRAND TOTAL		PAGU	10,249,576,000	7,490,378,000	3,765,966,000	0	0	0	0	0	0	0	21,505,920,000
		REALISASI	10,126,277,750 (98.80%)	7,158,727,669 (95.57%)	3,730,925,000 (99.07%)	0 (0.00%)	21,015,930,419 (97.72%)						
		SISA	123,298,250	331,650,331	35,041,000	0	0	0	0	0	0	0	489,989,581



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA



KANTOR PELAYANAN DAN ADMINISTRASI

JL. C3 GEDUNG KARANTINA PERTANIAN
BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA,
TANGERANG 15126, BANTEN
TELP. (021) 5507932 FAX. (021) 5506738

 @bkipmjakarta1

 @bbkipmjakarta1

 BBKIPM Jakarta 1

 www.kkp.go.id/bbkipmjakarta1
www.mpoksiti.id